

BAB 1

PENDAHULUAN

Dewasa ini hak asasi manusia banyak dibicarakan orang. Hak asasi manusia menjadi sangat menarik untuk dibahas karena merupakan hak-hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir dan merupakan anugerah dari Tuhan. Contoh hak asasi manusia antara lain : hak untuk hidup, hak untuk memperoleh pendidikan, hak untuk hidup bersama-sama seperti orang lain, hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama, dan hak untuk mendapatkan pekerjaan.¹ Namun tidak semua orang dapat menghargai dan menghormati adanya hak asasi manusia. Hal ini tercermin dari berita-berita tentang diskriminasi, pembunuhan massal, penyiksaan, dan penghilangan lawan-lawan politik secara kekerasan, kekejaman, dan kesewenang-wenangan tanpa mengindahkan adanya hak dasar sebagai manusia. Tindak pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan baik itu oleh perorangan ataupun kelompok tertentu dan bahkan negara, yang memiliki kepentingan sendiri baik itu dengan alasan keamanan nasional ataupun kepentingan nasional. Tentunya hal ini tidak dapat dibenarkan. Apalagi untuk mencapai tujuan itu digunakan kekuatan militer. Tentunya ini akan berdampak terhadap pelanggaran hak-hak asasi yang dimiliki setiap warga sipil yang terkena imbas dari tindakan mengatasnamakan kepentingan nasional.

¹ http://id.wikipedia.org/wiki/Hak_asasi_manusia, 10 April'09

Kisah Rohingya menambah panjang sejarah kelam pelanggaran HAM di dunia pada umumnya dan Myanmar pada khususnya. Sudah lama junta militer menerapkan peraturan ketat terhadap perkembangan agama-agama selain Budha, agama resmi Negara Myanmar. Ini membuat implementasi hak kebebasan beragama bagi agama minoritas di negara itu terbatas. Sebelumnya, Pemerintah Myanmar memenjarakan penganut Kristen aliran Chin. Kasus itu bahkan mendapat perhatian serius dari Lembaga HAM PBB yang akhirnya menyurati pemerintah junta. Sayangnya, junta militer tidak pernah menghiraukan imbauan lembaga HAM PBB, bahkan malah melarang utusan lembaga itu untuk bertemu dengan korban di penjara.²

Berdasarkan keterangan dari Amnesty Internasional, orang-orang Rohingya mengalami berbagai penindasan hak asasi manusia oleh Junta Militer Burma sejak 1978.³ Hak kebebasan untuk bepergian (freedom to movement) bagi orang-orang Rohingya dibatasi secara ketat dan sebagian besar dari mereka tidak diakui sebagai warga negara Myanmar. Pihak Junta telah melakukan kekejaman-kekejaman lainnya yaitu berupa pembunuhan etnis Rohingya, bahkan hal ini dilakukan secara acak dalam rangka pemusnahan etnis Rohingya. Selain itu penyiksaan dan penahanan secara ilegal dilakukan setiap hari di Arakan, ratusan etnis Rohingya hilang dan tidak diketahui nasibnya tiap tahunnya. Saat ini Arakan telah menjadi ladang pembantaian etnis Rohingya. Tentu saja tindakan junta

²<http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/02/16/00283510/rohingya.dan.masa.depan.minoritas>, diakses tanggal 10 april 00:58 wib.

³http://www.indies.myphp.net/index.php?option=com_content&view=article&id=103:tentang-rohingya&catid=13:catatan-minggu-ini&Itemid=54, diakses tanggal 8 April'09.

militer Myanmar yang mengatasnamakan kepentingan nasional terbukti telah melakukan pelanggaran HAM berat.

Melihat pemaparan singkat di atas tindakan junta militer Myanmar yang tidak mengindahkan hak-hak asasi etnis minoritas Rohingya tidak dapat dibenarkan. Oleh karena itu dengan terus berkembangnya dinamika dalam hak asasi manusia, mengenai pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan gerakan separatisme sebagai dampak dari tindakan pemerintah yang sewenang-wenang Penulis sangat tertarik untuk mengangkat judul “ *Gerakan Separatisme Etnis Minoritas Muslim Rohingya Sebagai Dampak Dari Tindakan Represif Pemerintahan Junta Militer Myanmar* ”.

Seperti diketahui, kasus pelanggaran HAM etnis minoritas Rohingya sudah berlangsung sejak lama, namun solusi atas kasus Rohingya menjadi dilematis dan bahkan tidak ada titik temunya. Mengenai sejumlah kasus pelanggaran HAM di Myanmar sudah diteriakkan oleh berbagai kelompok NGO, namun junta militer di negara itu tetap bergeming. Terampasnya hak-hak dasar yang dimiliki etnis minoritas Rohingya tentunya akan sangat menarik untuk dibahas dan diteliti.

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat dunia internasional, terutama negara-negara di kawasan ASEAN termasuk Indonesia, dicengangkan oleh kisah yang menyedihkan tentang “manusia perahu” sebutan bagi orang-orang Rohingya yang dipercaya berasal dari Myanmar dan Bangladesh. Orang-orang Rohingya tiba dalam keadaan yang sangat memilukan, Terkatung-katung di tengah laut tanpa bekal yang cukup.

Kini, jumlahnya diperkirakan sudah mencapai sekitar 400 orang yang datang dalam dua gelombang dan kini ditempatkan di Pulau Weh, Propinsi NAD.⁴

Pemberitaan mengenai masalah-masalah kemanusiaan orang-orang Rohingya tidak seluas pemberitaan atas masalah yang sama yang dialami etnis-etnis minoritas lain, seperti etnis Karen yang juga mendapatkan perlakuan sama buruknya dari junta militer Myanmar.

Etnis Rohingya adalah penduduk asli negara bagian Arakan. Arakan sendiri merupakan sebuah wilayah seluas 14.200 mil persegi yang terletak di barat Myanmar. Kawasan tersebut sangat terpencil dan berbatasan langsung dengan Bangladesh. Saat ini dihuni oleh sekitar 5 juta penduduk yang terdiri dari dua etnis utama, Rohingya yang Muslim dan Rakhine/Maghs yang beragama Buddha.

Kata Rohingya sendiri berasal dari kata Rohang, yang merupakan nama lama dari negara bagian Arakan. Etnis Rohingya sudah tinggal di Arakan sejak abad ke 7 Masehi. Penduduk di kawasan tersebut umumnya berasal dari keturunan Arab yang hijrah ke wilayah tersebut sejak masa kekhalifahan Mughal, Kekhalifahan Muslim yang pernah berkuasa di sub-kontinen India pada 1526-1858. Ciri-ciri ini terlihat dari tampilan fisik, bahasa, dan kebudayaan, yang menunjukkan kedekatan orang-orang Rohingya dengan masyarakat Asia Selatan, khususnya orang-orang Chittagonian.

Meski berada dalam posisi yang terpencil, namun kiprah politik orang-orang Rohingya dalam sejarah pemerintahan Myanmar (sebagian orang Myanmar

⁴http://www.indies.myphp.net/index.php?option=com_content&view=article&id=103:tentang-rohingya&catid=13:catatan-minggu-ini&Itemid=54, diakses 28 febuari 2009

lebih suka menggunakan "Burma"), bisa dikatakan pernah ada. Hal ini dilihat dari beberapa tokoh yang berasal dari Rohingya, yakni Sultan Mahmood pernah menjabat sekretaris politik dan terakhir menjabat sebagai menteri kesehatan pada masa pemerintahan U Nu. Orang-orang Rohingya lain yang pernah menduduki jabatan-jabatan politik di Myanmar adalah Sultan Ahmed dan Abdul Gaffar yang pernah menjadi sekretaris parlemen.⁵

Namun kiprah politik orang-orang Rohingya berakhir setelah Junta Militer berkuasa di Burma. mereka telah menghilangkan hak politik etnis Rohingya secara sistematis. Tidak hanya dibatasi dalam hal politik saja, bahkan hak-hak kemanusiaan dan kehidupan yang layak pun dirampas oleh junta militer Myanmar.

Dengan diundangkannya UU Kewarganegaraan tahun 1982 etnis Rohingya disebut sebagai warga non-kebangsaan atau warga asing. Muslim Rohingya pun resmi dideklarasikan sebagai warga yang pantas untuk dimusnahkan. Rezim junta militer mempraktekkan dua kebijakan de-Islamisasi di Myanmar: pemusnahan fisik melalui genosida dan pembersihan etnis Muslim Rohingya di Arakan, serta asimilasi budaya bagi umat Islam yang tinggal di bagian Myanmar.

Contoh-contoh kasus pemusnahan fisik melalui genosida dan pembersihan etnis Muslim Rohingya yang terjadi di Arakan, adalah banyaknya Muslim Rohingya yang ditahan dengan cara sewenang-wenang, disiksa, dieksekusi

⁵ http://en.wikipedia.org/wiki/Rohingya_people, diakses tanggal 28 febuari'09

dengan cepat, dan dibunuh. Muslim Rohingya dipaksa menjadi buruh pagi-siang-malam. Sawah-sawah dirampas dan rumah mereka diakuisisi warga baru Budha. Masjid dan madrasah diledakkan lalu diganti dengan pembangunan pagoda dan kuil Buddha. Muslimah Rohingya diperkosa dan tidak diperlakukan dengan hormat. Mereka dipaksa untuk menikah dengan pria-pria Budha, dilarang mengenakan hijab, dan dilarang menikah dengan sesama Muslim Rohingya. Muslim Rohingya juga dilarang bepergian dari satu desa ke desa lain meski dalam satu kecamatan, baik itu untuk urusan kemasyarakatan, keagamaan, perdagangan, maupun bisnis.

Berdasarkan keterangan dari Amnesty Internasional, orang-orang Rohingya mengalami berbagai penindasan hak asasi manusia oleh Junta Militer Burma sejak 1978.⁶ Junta militer menganggap etnis Rohingya bukanlah warga negara Myanmar. Menurutnya etnis Rohingya merupakan pendatang yang ditempatkan oleh penjajah Inggris dari Bangladesh.

Untuk saat ini, orang-orang Rohingya dan orang-orang dari etnis-etnis minoritas lainnya yang berasal dari wilayah Myanmar bisa dikatakan sebagai “stateless citizen”, maksudnya adalah penduduk yang kehilangan status kewarganegaraan karena alasan-alasan politik. Maka tidak mengherankan jika faktor-faktor tersebut menjadi pendorong orang-orang Rohingya untuk mengungsi dan mencari perlindungan ke negara-negara tetangga seperti Indonesia dan

⁶http://www.indies.myphp.net/index.php?option=com_content&view=article&id=103:tentang-rohingya&catid=13:catatan-minggu-ini&Itemid=54, diakses 28 febuari 2009

Thailand. Dengan harapan mereka mendapatkan perlindungan kemanusiaan dari negara-negara yang mereka singgahi.

Namun pada kenyataannya, harapan mereka untuk mendapatkan perlindungan dari negara-negara tetangga seperti Indonesia dan Thailand tidak selalu mendapatkan respon yang positif. Sebagai contoh saat mereka berada di Thailand, orang-orang Rohingya sempat mendapat perlakuan yang tidak manusiawi. Saat ditangkap otoritas keamanan Thailand dan kemudian dibawa ketengah laut, disatukan dengan warga Myanmar lainnya yang sudah lebih dahulu ditangkap. Ditengah laut mereka disiksa selama tiga bulan, mereka dipukuli oleh pasukan keamanan yang datang silih berganti, diberi minum hanya seteguk air putih dalam sehari , diberi makan beras yang tidak dimasak, dan dilepaskan ketengah samudera hanya menggunakan perahu reyot tak bermesin tanpa bekal makanan yang cukup.⁷

Di Indonesia sendiri perlakuannya sedikit lebih baik dibandingkan dengan di negara Thailand. Meskipun sedikit menuai pro dan kontra. Bagi masyarakat yang pro, mereka sepantasnya mendapatkan kepedulian dari masyarakat internasional karena menyangkut perlindungan HAM. Sedangkan bagi masyarakat yang kontra mereka dianggap hanya sebagai pengungsi yang sejauh ini diketahui motif mereka hanya mencari kehidupan yang lebih baik atau bisa digolongkan sebagai migran bermotif ekonomi. Oleh karena itu Indonesia tidak membuka diri bagi migran bermotif ekonomi, mereka harus dipulangkan ke negara asal.

⁷<http://news.okezone.com/read/2009/02/04/1/189595/1/manusia-perahu-tak-ingin-tinggalkan-aceh>, 28 feb'09

Permasalahan bahwa orang-orang Rohingya itu adalah "pengungsi ekonomi" atau "pengungsi politik" semestinya tidak membutuhkan mata kita akan pentingnya mendahulukan penanganan kemanusiaan. Dengan menilik pada sejarahnya dan latar-belakang sosialnya, setiap orang Rohingya yang terdampar di Aceh saat ini barangkali bisa disebut sebagai orang-orang yang melarikan diri dari penganiayaan. Padahal jika ditilik dari sejarahnya, etnis Rohingya tidak pernah menentang bahkan cenderung pernah berkiprah dan berjasa untuk Myanmar pada masa pemerintahan U Nu, tetapi mengapa kemudian junta militer melakukan pembantaian terhadap Rohingya.

Dari kasus tersebut mendorong penulis tertarik untuk menganalisa lebih jauh mengenai munculnya tindakan perlawanan dari etnis minoritas Muslim Rohingya sebagai dampak dari tindakan represif pemerintahan junta militer Myanmar.

B. Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka penulis menetapkan pokok permasalahan yang bisa dijadikan sumber penelitian yakni, *“Apa motif junta militer Myanmar melakukan pelanggaran HAM terhadap etnis minoritas Rohingya?”*

C. Tujuan Penelitian

Dalam melakukan penelitian dan penulisan skripsi tentunya haruslah memiliki tujuan yang jelas, berikut adalah tujuan dari penulisan skripsi ini :

1. Mengetahui mengenai sejarah Myanmar, dan mengetahui proses terbentuknya pemerintahan junta militer di Myanmar.
2. Memberikan deskripsi tentang sejarah etnis minoritas Rohingya dan mengetahui bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh junta militer terhadap etnis minoritas Rohingya yang terjadi di Myanmar.
3. Mengaplikasikan teori-teori yang penulis dapat selama dibangku kuliah sebagai manifestasinya.

D. Kerangka Pemikiran

Dalam upaya menjawab setiap permasalahan di butuhkan analisa dalam bentuk konsep maupun teori. Berikut adalah definisi, konsep, dan teori yang di gunakan dalam menjawab permasalahan yang telah dipaparkan di atas.

Yang dimaksud dengan minoritas adalah :

1. *A group of people or things that is small part of much longer group.*

(Sekelompok orang atau sesuatu yang merupakan bagian kecil dari kelompok yang lebih besar).

2. *A group of people, within society, whose member have different ethnic, racial, national, religious, sexual, politican, linguistic, or other characteristics from the rest of the society.*

(Sekelompok orang didalam sebuah masyarakat dimana anggotanya memiliki perbedaan etnis, ras , kebangsaan , agama ,

jenis kelamin, politik, bahasa, atau karakteristik- karakteristik lain yang berbeda dari keseluruhan masyarakat).⁸

Sedangkan didalam *Oxford dictionary* istilah minoritas didefinisikan sebagai :

1. *A smaller number or part, especially within a political party or structur.*

(jumlah atau bagian yang lebih kecil, terutama didalam sebuah partai politik atau struktur).

2. *A relatively small group of people differing from others in the society of which they are part in race, religion, language, political persuasion, etc.*

(Sekelompok orang yang relatif berbeda dari yang lainnya dalam sebuah masyarakat dimana mereka merupakan bagian dari suatu ras, agama, bahasa, keyakinan politik, dan lain-lain).⁹

Dari definisi diatas dapat diketahui bahwa etnis Rohingya merupakan etnis minoritas muslim yang berasal dari kawasan Arakhan di sebelah barat Myanmar.

⁸ Encarta.msn.com, 28 febuari '09

⁹ Oxford University Press, Second Edition, New York, 2002, hal.265

Konsep Integrasi

Menurut Myron Weiner, Konsep integrasi biasanya menunjuk pada upaya penyatuan berbagai kelompok masyarakat yang berbeda-beda secara sosial, budaya, maupun politik ke dalam satu kesatuan wilayah untuk membangun kesetiaan yang lebih besar dan bersifat nasional. Dalam hal ini integrasi dipandang sebagai usaha meniadakan kesetiaan-kesetiaan picik dan ikatan-ikatan yang lebih sempit.¹⁰

Menurut Howard Wriggin, yang pada dasarnya mengemukakan konsep yang serupa dengan Myron Weiner, mengatakan integrasi berarti suatu penyatuan bagian yang berbeda-beda dari suatu masyarakat kecil menjadi keseluruhan yang lebih utuh atau memadukan masyarakat-masyarakat kecil yang banyak jumlahnya menjadi suatu bangsa.¹¹ Dari sudut pandang pemerintah suatu negara yang semakin meningkat untuk menerapkan kekuasaannya di seluruh wilayah negara.¹²

Secara garis besar, ada dua strategi yang dapat dipilih untuk mencapai integrasi bangsa, yaitu asimilasi dan kesatuan dalam keanekaragaman (Unity in Diversity).¹³ Strategi asimilasi yaitu menghapus sifat-sifat kultural berbagai kelompok dan menggantikannya dengan satu “ *kebudayaan Nasional*” yang berasal dari kelompok dominan. Sedangkan”Unity in Diversity” berarti

¹⁰ Myron weiner, “Integrasi politik dan pembangunan politik”, dalam Yahya Muhaimin dan Collin Mc Andrews (eds) “Masalah-Masalah Pembangunan Politik”. Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1991, hal 41

¹¹ Howard Wriggins, “integrasi Bangsa”, dalam Yahya Muhaimin dan Collin Mc Andrews, op.cit., hal 51.

¹² Yahya Muhaimin dan collin Mc Andrews, “ Masalah-Masalah Pembangunan Politik”, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1991. hal 51.

¹³ Charles F. Andrian, “ Kehidupan Politik dan perubahan Sosial”, (terj) PT. Tiara Wacana Yogyakarta, 1992, hal 89-90.

penciptaan kesetiaan nasional tanpa menghapus identitas kelompok masing-masing. Loyalitas kelompok berdampingan dengan loyalitas terhadap satu negara, kelompok-kelompok itu didorong untuk saling bekerjasama demi tujuan yang sama. Unity in diversity berpegang pada prinsip proporsional. Setiap kelompok akan diwakili dalam suatu lembaga sesuai dengan proporsi pendukungnya.

Sedangkan menurut James J. Coleman dan Carl G. Rosberg, ada dua dimensi utama konsep integrasi, yaitu integrasi vertikal dan integrasi horizontal. Integrasi vertikal sering disebut sebagai integrasi politik yang mencakup masalah yang timbul dalam hubungan negara dengan masyarakat. Sedangkan integrasi horizontal lebih bersifat kultural dan karena itu mencakup persoalan ketegangan hubungan diantara berbagai kelompok kultural di dalam masyarakat itu sendiri.¹⁴

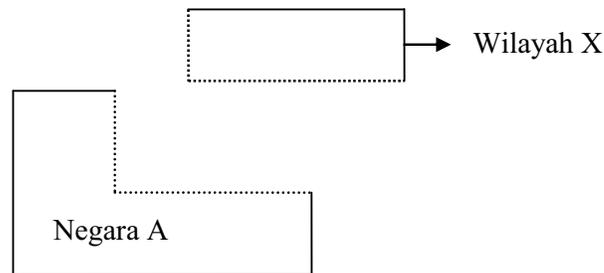
Separatisme

Kebanyakan dari sekitar 170 negara bangsa memiliki sejumlah besar penduduk minoritas. Meskipun sebagian sudah berasimilasi cukup lama dengan kelompok-kelompok penduduk lainnya, banyak kelompok minoritas yang masih merasa terpisah dan berbeda. Perbedaan ini berkembang menjadi gerakan separatisme dengan dilontarkannya tuntutan formal pemisahan wilayah untuk membentuk sebuah negara tersendiri atau tidak jauh dari bentuk ekstrim ini, sebatas otonomi yang bebas dari pengaturan negara induk. Tuntutan-tuntutan

¹⁴<http://downloads.ziddu.com/downloadfile/3959644/makalahpancasilapotensidisintegrasinasional.doc.html> tgl 9 juli'09, pk1 01:55 wib.

separatis ini biasanya ditolak oleh pemerintah pusat karena tuntutan ini mengancam integrasi politik dan wilayahnya.¹⁵

Gejala separatisme digambarkan sebagai berikut :



Wilayah X menginginkan melepaskan diri dari negara A sebagai bentuk separatisme. Begitu juga Rohingya, wilayah Arakan yang terletak di sebelah barat Myanmar yang dihuni oleh minoritas muslim yang ingin memisahkan diri dari kekuasaan Myanmar untuk membentuk negara Islam yang merdeka.

Aksi-aksi yang dilakukan oleh masyarakat Rohingya adalah karena kekecewaan mereka terhadap pemerintah yang berangsur-angsur menekan kaum minoritas muslim Rohingya yang dianggap sebagai ancaman terhadap pemerintah.

Dalam hal ini junta militer Myanmar menerapkan strategi asimilasi dan konsep integrasi vertikal untuk mencapai integrasi bangsa, sehingga etnis Rohingya harus melebur identitas sosio kultural dan politik mereka. Dari segi asimilasi contohnya dengan merubah wilayah strategis Arakan yang didominasi Muslim menjadi didominasi kalangan Buddha dengan merubah konstelasi

¹⁵ Walter S. Jones, Logika Hubungan Internasional 2, (Jakarta : Gramedia, 1992), hal 182.

demografis Arakan. Bahkan kini nama Arakan diubah pemerintah menjadi Rakhine, nama khas Budha. Selain itu junta militer Myanmar berusaha untuk mendominasi agama masyarakatnya menjadi agama Budha yang merupakan agama mayoritas di Myanmar.¹⁶ Tujuannya untuk memperkecil perbedaan guna terciptanya satu kesatuan wilayah untuk membangun kesetiaan yang lebih besar dan bersifat nasional. Sedangkan konsep integrasi vertikal merupakan integrasi yang timbul dalam hubungan negara Myanmar dengan masyarakat khususnya etnis minoritas Rohingya. Banyak upaya yang dilakukan junta militer Myanmar dalam rangka melakukan integrasi. Akan tetapi persoalannya junta militer Myanmar banyak melakukan pelanggaran HAM berat terhadap etnis minoritas Rohingya dalam proses integrasi tersebut. Junta Myanmar cenderung melakukan integrasi karena faktor untuk memperkokoh kekuasaan ketimbang suatu integrasi nasional. Maka bukan hal yang mustahil pelanggaran HAM terhadap etnis Rohingya menimbulkan disintegrasi dan memunculkan gerakan separatisme. Salah satu contohnya adalah kelompok gerakan "Arakan Rohingya National Organization" (ARNO). Gerakan separatis ini merupakan gabungan dari gerakan "The Rohingya Solidarity Organization" (RSO) dan gerakan "the Arakan Rohingya Islamic Front" (ARIF). Gerakan ini merupakan kerangka pembebasan nasional dan hak menentukan nasib sendiri yang dianggap ancaman bagi junta militer Myanmar. Lebih jelas lagi, potensi disintegrasi dan separatisme itu muncul ketika elite politik, terutama elite birokrasi negara (sipil maupun militer),

¹⁶ <http://rizkisaputro.wordpress.com/2009/02/12/kasus-muslim-rohingya-%E2%80%93-gerakan-anti-muslim-di-asia-tenggara/> , diakses 28 febuari 2009

memanipulasi kepentingan pribadi, keluarga, dan kelompok sebagai “kepentingan nasional” serta menyalahgunakan otoritas negara untuk melindungi dan mempertahankan kekuasaan. Fenomena manipulasi itulah tampaknya yang lebih relevan dalam melihat berbagai kasus empirik yang berkaitan dengan soal integrasi.¹⁷

E. Hipotesa

Berdasarkan latar belakang masalah dan melihat rumusan masalah, penulis menarik hipotesa tentang alasan junta militer Myanmar melakukan pelanggaran HAM terhadap etnis minoritas Rohingya adalah karena sebab- sebab berikut :

- Junta militer Myanmar ingin memperkecil perbedaan guna terciptanya satu kesatuan wilayah untuk membangun kesetiaan yang lebih besar dan bersifat nasional dengan cara integrasi bangsa, sehingga etnis Rohingya dipaksa untuk melebur identitas sosio, kultur, politik, dan agama mereka.
- Adanya asistensi internasional terhadap gerakan separatisme Etnis Muslim Rohingya.

¹⁷ Ibid, hal.8

F. Jangkauan Penelitian

Agar penulisan ini tidak melebar, maka perlu untuk memberikan batasan atau ruang lingkup penelitian. Penulis lebih memfokuskan penulisan ini dari mulai munculnya isu-isu pelanggaran HAM di Myanmar pada tahun 2000 hingga sampai pada terjadinya pengungsian orang-orang Rohingya ke negara-negara tetangga seperti Indonesia, Bangladesh , Thailand dan lain-lain pada tahun 2009.

G. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskripsi analisis yaitu dengan cara menguraikan dan menggambarkan fenomena berdasarkan hasil pengamatan data yang diperoleh. Dalam penelitian ini, penulis berusaha menggambarkan apa saja tindak pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan junta militer Myanmar terhadap etnis minoritas Rohingya.

Penulis dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sekunder yaitu melalui studi pustaka dengan mengumpulkan teori dan konsep yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini, seperti buku-buku, literatur-literatur, artikel baik koran maupun internet, dan sumber lain yang dianggap relevan.

H. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan di uraikan dan dijelaskan bagian yang menjadi dasar dan pendahuluan dalam penulisan skripsi ini yaitu: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, hipotesa jangkauan penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan dan kerangka penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM NEGARA MYANMAR & SEJARAH PEMERINTAHAN JUNTA MILITER

Pada bab ini penulis akan menguraikan pembahasan mengenai profil negara Myanmar, keadaan geografi Myanmar, sejarah awal Myanmar, sejarah terbentuknya nama Myanmar, Pembagian divisi di Myanmar, kehidupan sosial & budaya di Myanmar, perekonomian di Myanmar, gambaran kemiskinan rakyat Myanmar, masa penjajahan di Myanmar , demokrasi di Myanmar & sejarah terbentuknya pemerintahan junta militer.

BAB III : ETNOGRAFIS ETNIS MINORITAS MUSLIM
ROHINGYA DI MYANMAR & KASUS
PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA

Pada bab ini berisikan tentang sejarah dan sosiologis etnis minoritas Muslim Rohingya dan peranannya dalam pemerintahan di Myanmar, bentuk- bentuk Pelanggaran Hak Azasi Manusia, dan pengungsian etnis minoritas Rohingya.

BAB IV : PENYEBAB JUNTA MILITER MYANMAR
MELAKUKAN PELANGGARAN HAM &
DAMPAKNYA TERHADAP ETNIS MINORITAS
MUSLIM ROHINGYA

Pada bab ini akan dikaji dan dibahas guna menjawab pokok permasalahan dan hipotesis. Penulis akan membahas tentang penyebab junta militer Myanmar melakukan pelanggaran HAM terhadap etnis minoritas Rohingya, penguatan identitas Muslim Rohingya yang mempengaruhi tumbuhnya Split Community di Myanmar, hingga adanya asistensi internasional terhadap gerakan separatisme Etnis Muslim Rohingya

BAB V : KESIMPULAN

Pada bab V ini berisi kesimpulan dari apa yang ada dari bab- bab sebelumnya.